

## PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN PADA PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Ni Putu Budiadnyani

<sup>a</sup>Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar  
Kontak : [aputubudiadnyani@undiknas.ac.id](mailto:aputubudiadnyani@undiknas.ac.id)

### ABSTRAK

***Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi.*** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-probability dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dan Moderated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak.

**Kata kunci:** kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, penghindaran pajak.

### ABSTRACT

***Effect of Management Compensation on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable.*** This study aims to obtain empirical evidence of the effect of management compensation on tax avoidance. In addition, this study also aims to obtain empirical evidence of institutional ownership moderating the effect of management compensation on tax avoidance. The population in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2018 period. The sampling method used in this study is a non-probability approach using purposive sampling technique. The samples used in this study were 48 companies. Data analysis techniques used in this study are linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the results of the analysis found that management compensation has a negative effect on tax avoidance, institutional ownership weakens the effect of management compensation on tax avoidance.

**Keywords:** management compensation, institutional ownership, tax avoidance.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 ayat 1). Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari Sumber Daya Alam dimana jumlahnya cenderung stagnan dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan penerimaan negara melalui pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya (Swingly dan Sukartha, 2015). Pesaratnya peningkatan target penerimaan perpajakan tidak dibarengi dengan tingginya realisasi penerimaan pajak dari yang ditargetkan. Penerimaan pajak yang belum mencapai target menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum optimal. Adapun salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak negara adalah tindakan penghindaran pajak, karena dengan adanya tindakan penghindaran pajak berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Data mengenai tingginya target penerimaan pajak kontradiktif dengan keinginan pemilik perusahaan untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak Negara. Namun, perusahaan memiliki kecenderungan melakukan usaha pengelolaan terhadap beban pajaknya agar seminimum mungkin dengan tujuan memperoleh laba yang maksimal. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Pihak manajemen perusahaan beranggapan bahwa beban pajak yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya melalui berbagai cara baik secara legal maupun ilegal (Oktagiani, dkk., 2015).

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *et al.* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan suatu usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan *tax evasion* adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat ilegal (*unlawful*). *Tax avoidance* dapat dilakukan oleh perusahaan karena adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Beberapa perusahaan di Indoensia telah terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan kasus penghindaran pajak yang merugikan negara salah satunya PT Bumi Resources Tbk. Penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Zulma, 2016). Adanya risiko besar atas tindakan penghindaran pajak tidak menurunkan minat untuk melakukan penghindaran pajak karena terdapat manfaat yang cukup besar dari upaya penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, lemahnya aturan perpajakan di Indonesia juga turut memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Suandy, 2003 dalam Zulma, 2016).

Keputusan penghindaran pajak dibuat oleh manajer, sehingga perilaku penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik guna mencapai keuntungan jangka pendek, bukan untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Pemberian kompensasi kepada manajer

berkaitan erat dengan hubungan keagenan antara pemegang saham dan manajer. Manajer sebagai *agent* menginginkan bonus atas kinerjanya yang menyebabkan manajer cenderung bersifat oportunistik. Sedangkan pemegang saham ingin masa depan perusahaan tetap terjamin keberlanjutannya dan investasi mereka tetap aman. Pemberian kompensasi yang optimal kepada manajer dapat menurunkan masalah keagenan dalam perusahaan, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menurunkan perilaku oportunistik manajer dalam melakukan penghindaran pajak yang dapat membahayakan masa depan perusahaan (Ozkan, 2011). Morck dan Yeung (2003) menyatakan dari perspektif teori keagenan, tindakan oportunistik manajer cenderung menghasilkan keputusan yang dapat merugikan perusahaan.

Mayangsari, dkk. (2015) dan Zulma (2016) membuktikan terdapat pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka akan menimbulkan ketidakpastian yaitu apakah tindakan pajak tersebut berisiko atau tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan (Murphy, 2004). Namun, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hanafi dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak perusahaan serta penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) serta Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor badan luar negeri, dan bank (Dewi dan Jati, 2014). Keberadaan kepemilikan oleh investor institusional mampu mengawasi kinerja manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa investor institusional memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer. Investor institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009), menunjukkan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan memengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2014) menunjukkan bahwa investor institusional memiliki pengaruh negatif pada tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena para pemilik saham institusional cenderung menghindari risiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak ingin mengambil risiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Selain itu, investor institusional juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmama (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Saat ini penelitian yang meneliti mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Beberapa faktor yang sudah diteliti adalah *corporate governance* (Kurniasih dan Sari, 2013; Puspita dan Harto, 2014; serta Dewi dan Sari, 2015), *return on assets* (Kurniasih dan Sari, 2013 dan Damayanti dan Susanto, 2015), *leverage* (Kurniasih dan Sari, 2013; Ngadiman dan Puspitasari, 2014; serta Mayangsari, dkk., 2015), ukuran perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013; Dewi dan Jati, 2014; serta Ngadiman dan Puspitasari, 2014), dan kompensasi manajemen (Irawan dan Farahmita, 2012; Dewi dan Sari, 2015; serta Zulma, 2016). Beberapa variabel telah menunjukkan hasil yang konsisten. Variabel yang saat ini masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian adalah kompensasi manajemen. Selain itu, peneliti menggunakan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Alasan peneliti menggunakan variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah peran dari kepemilikan institusional sebagai bentuk pengawasan secara eksternal dapat memonitor manajemen secara intensif yang dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal.

Bagian selanjutnya membahas kajian literatur yang mengurai mengenai *grand theory* (teori utama) serta *supporting theory* (teori pendukung) yang digunakan dalam penelitian.

Teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai dasar untuk perumusan hipotesis. Selanjutnya, diikuti oleh penjelasan mengenai metode. Dan terakhir akan dibahas dan disimpulkan mengenai hasil penelitian.

## KAJIAN LITERATUR

Bagian ini menguraikan mengenai kajian literatur dan pengembangan hipotesis penelitian. Diawali dengan menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan yang menjelaskan mengenai *grand theory* (teori utama) serta *supporting theory* (teori pendukung) yang digunakan dalam penelitian. Teori dan penelitian sebelumnya dijalin sebagai satu kesatuan argumentasi yang dapat mengarahkan pada perumusan hipotesis.

### Literatur 1 Grand Theory

Terdapat satu *grand theory* atau teori utama dalam penelitian ini yaitu teori keagenan (*agency theory*).

#### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Hubungan keagenan muncul dari perikatan antara dua orang atau lebih. Manajer bertugas mengambil keputusan dan mewakili kepentingan pihak yang menunjuk yang disebut para pemilik dengan pihak lain yang secara umum berhubungan dengan pemecahan suatu masalah (Ross, 1973). Teori keagenan berfokus pada penentuan kontrak yang efisien yang memengaruhi hubungan antara manajer dan pemegang saham. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu (1) manajer dan pemegang saham memiliki informasi yang simetris yang artinya baik manajer maupun pemegang saham memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk memberi keuntungan pada diri sendiri, dan (2) risiko yang dipikul manajer berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti manajer mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterima (Sukartha, 2008).

Perbedaan kepentingan dan perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer dan pemegang saham dapat menimbulkan adanya konflik keagenan dalam perusahaan. Konflik keagenan yang timbul antara manajer dan pemegang saham menimbulkan biaya keagenan (Lins, 2003). Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat tiga macam biaya keagenan, yaitu biaya *monitoring* oleh pemegang saham, biaya *bonding* oleh manajer, dan *residual loss*. Biaya *monitoring* dikeluarkan oleh pemegang saham untuk membatasi aktivitas manajer yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, manajer juga mengeluarkan sumber daya (*bonding cost*) untuk meyakinkan pemegang saham bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham. Sedangkan, *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya atau penurunan kemakmuran pemegang saham sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Dalam rangka mengatasi perbedaan kepentingan tersebut, pihak pemegang saham dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajer. Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang sesuai yang diberikan kepada manajer (Irawan dan Farahmita, 2012).

### Literatur 2 Supporting Theory

Terdapat empat *supporting theory* atau teori pendukung dalam penelitian ini yaitu teori akuntansi positif (*positif accounting theory*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), kompensasi manajemen, dan kepemilikan institusional.

### **Teori Akuntansi Positif (*Positif Accounting Theory*)**

Teori akuntansi positif merupakan suatu bangun teori akuntansi yang mempunyai sasaran untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi (Astika, 2009). Berdasarkan teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya. Adanya kebebasan pemilihan prosedur yang tersedia, menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai *opportunistic behaviour* (tindakan oportunistik) (Scott, 2000). Hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam bentuk oportunistik yang sering diinterpretasikan, yaitu:

#### 1) Hipotesis Program Bonus (*Plan Bonus Hypothesis*)

Pada hipotesis program bonus, manajer perusahaan dengan rencana kompensasi cenderung lebih menyukai metode yang memindahkan laba periode mendatang menjadi laba periode sekarang. Dalam hal ini karena alasan-alasan tertentu, manajer memiliki insentif untuk memanipulasi atau mengatur laba yang dilaporkan dengan menggunakan kewenangannya melalui pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi besar kecilnya laba.

#### 2) Hipotesis Persyaratan Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang mempunyai *leverage* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Semakin tinggi rasio utang/ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio utang/ekuitas, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Dalam hal ini manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

#### 3) Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik perusahaan, maka semakin mungkin manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba periode sekarang ke periode mendatang. Bagi perusahaan yang cenderung menjadi sorotan banyak orang, maka besar kecilnya laba yang tercermin dalam angka-angka akuntansi akan diterjemahkan berbeda oleh banyak pihak. Umumnya perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil.

Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditur, dan antara manajemen dengan pemerintah (Setijaningsih, 2012). Pada penelitian ini dari ketiga hipotesis tersebut, hipotesis biaya politik yang tepat menggambarkan penelitian ini. Hal ini dikarenakan dalam *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, maka semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba periode sekarang ke periode mendatang. Suatu perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang diperoleh pada tahun sekarang untuk mengecilkan biaya politik yang dikeluarkan.

### **Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Dyrenge *et al.* (2008) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai segala upaya yang dilakukan perusahaan yang mengakibatkan adanya pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2011). Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada (Lumbantoran, 1996 dalam Mangoting, 1999). Balakrishnan *et al.* (2012) menyebutkan bahwa terdapat dampak dari adanya penghindaran pajak yaitu menimbulkan risiko terhadap perusahaan. Selain itu, Mills (1998) juga menyatakan adanya penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko pemeriksaan pajak.

### **Kompensasi Manajemen**

Kompensasi ialah suatu penghargaan dapat berupa material atau non material yang diberikan kepada manajer agar termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan adanya kompensasi adalah untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan kepentingan manajer perusahaan. Kompensasi dapat memberikan efek jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif jangka panjang berupa saham atau memberikan insentif jangka pendek berupa kas (Amri, 2017). Morck dan Yeung (2003) menyatakan bahwa dari perspektif teori keagenan, tindakan oportunistik manajer cenderung menghasilkan keputusan yang dapat merugikan perusahaan. Keadaan tersebut membuat pemegang saham berupaya memberikan kompensasi yang optimal kepada manajer untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan.

Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer dan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi untuk manajer cenderung mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax sheltering* merupakan upaya mengurangi tingkat pendapatan kena pajak, sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak. Penelitian oleh Armstrong *et al.* (2012) dan Minnick dan Noga (2010) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak dapat menimbulkan ketidakpastian apakah tindakan tersebut berisiko atau tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan (Murphy, 2004).

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor badan luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Teori keagenan menyatakan kepemilikan institusional akan mengurangi konflik keagenan karena pemegang saham oleh institusi akan membantu mengawasi perusahaan, sehingga manajer tidak akan bertindak merugikan pemegang saham (Laurenzia dan Sufiyati, 2015). Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) dapat membantu proses *monitoring*, sehingga dapat mengendalikan kinerja manajer secara efektif. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajer, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena investor institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif (Zemzem dan Ftouhi, 2013).

### Literatur 3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### ***Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak***

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dua pihak yang lebih dikenal dengan istilah masalah keagenan (Masri dan Martani, 2013). Manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Selain itu, adanya kebebasan pemilihan prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (Scott, 2000). Teori akuntansi positif mengungkapkan bahwa terdapat hubungan keagenan salah satunya hubungan antara manajemen dan pemerintah (Setijaningsih, 2012). Manajemen berupaya meminimumkan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dengan melakukan penghindaran pajak.

Untuk menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen (Irawan dan Farahmita, 2012). Ozkan (2011) dan Croci *et al.* (2012) menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang optimal kepada manajemen (CEO) dapat menurunkan masalah keagenan dalam perusahaan sehingga dapat dijadikan solusi untuk menurunkan perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang dapat membahayakan masa depan perusahaan. Morck dan Yeung (2003) menyatakan bahwa dari perspektif teori keagenan, CEO memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, tingkat kompensasi direksi yang optimal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan keselarasan antara pemilik dan manajemen yang menjalankan perusahaan Chalmers *et al.*, (2006) dan Armstrong *et al.*, (2012) membuktikan terdapat pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka akan menimbulkan ketidakpastian yaitu apakah tindakan pajak tersebut berisiko atau tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan (Murphy, 2004). Oleh karena itu, dapat diduga bahwa pemilik menganggap penghindaran pajak sangat berisiko bagi masa depan perusahaan sehingga pemilik akan memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar mereka tidak bersikap oportunistik dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012), Mayangsari, dkk. (2015), serta Zulma (2016) membuktikan terdapat pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah

H<sub>1</sub>: Kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

#### ***Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak***

Investor institusional memegang peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer yang dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan. Investor institusional disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated investors*) karena mempunyai informasi yang lebih unggul dibandingkan investor non-institusional, selain itu institusi juga mempunyai kemampuan analisis yang lebih kuat terhadap fundamental suatu perusahaan maupun industri sehingga investor institusional lebih mampu untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang dibandingkan investor lainnya. Selain faktor *sophisticated*, investor institusional pada umumnya menginvestasikan dana dalam jumlah yang besar, sehingga sudah seharusnya mereka melakukan *monitoring* yang lebih intensif terhadap kebijakan manajemen perusahaan (Warsini, 2016). Investor institusional sebagai

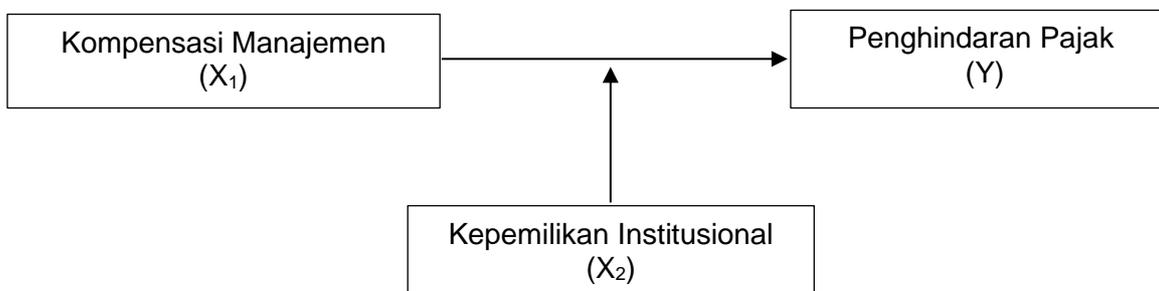
pemegang saham eksternal mampu mengurangi perilaku manajer yang oportunistik, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Terdapat pengaruh tidak langsung kepemilikan institusional dalam hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2006), di mana kepemilikan institusional digunakan sebagai ukuran kuat lemahnya mekanisme pengawasan dalam praktik *corporate governance*, dan membuktikan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar manajemen cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan terhindar dari perilaku oportunistik (Ahmad dan Septriani, 2008). Berdasarkan peran investor institusional sebagai pihak eksternal yang mampu melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajer maka diprediksi bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka pemberian kompensasi yang besar untuk manajer tidak perlu dilakukan karena investor institusional sudah melakukan *monitoring* yang intensif terhadap manajer. Adanya peran investor institusional dalam memonitoring manajemen, maka sifat oportunistik manajer bisa diminimalisasi dan semakin menekan manajer untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah.

H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak.

## METODE

Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini menjelaskan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi, sampel, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data, serta teknik analisis data. Kerangka konsep penelitian dipaparkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

Sumber: Data diolah, 2020

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tahun 2020. Pemilihan Bursa Efek Indonesia sebagai lokasi penelitian karena di bursa menyajikan data perusahaan go publik secara lengkap. Data yang diakses berupa laporan keuangan tahunan.

### Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah fenomena penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

### Identifikasi Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016, 38). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

2) Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau yang memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompensasi manajemen.

3) Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini memberikan deskripsi singkat mengenai variabel serta rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan yang mengakibatkan adanya pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyrenge *et al.*, 2008). Penelitian ini menggunakan proksi GAAP ETR yang membagi total beban pajak penghasilan yang terutang perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. GAAP ETR memperhitungkan beban pajak kini dan pajak tangguhan yang mampu menggambarkan adanya perbedaan waktu (temporer). Perbedaan waktu ini adalah proksi pengukuran penghindaran pajak yang efektif dan populer untuk mengurangi pajak saat ini dan memaksimalkan nilai waktu dari uang (Minnick dan Noga, 2010). GAAP ETR dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{TE}{PI}$$

Keterangan:

GAAP ETR = GAAP Effective Tax Rates

TE = Tax Expense (Total beban pajak penghasilan)

PI = Pretax Income (Laba sebelum pajak penghasilan)

2) Kompensasi Manajemen

Kompensasi merupakan bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan baik yang berbentuk finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar dapat merasa dihargai dalam bekerja (Mayangsari, dkk., 2015). Pengukuran kompensasi manajemen dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Zulma (2016). Kompensasi manajemen diprosikan dengan menghitung logaritma natural nilai kompensasi manajemen kunci yang diterima selama setahun.

$$\text{KM} = \ln (\text{TKM})$$

Keterangan:

KM = Kompensasi Manajemen

TKM = Total Kompensasi Manajemen Kunci  
ln = Logaritma Natural

### 3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor badan luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Khurana dan Moser (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$KI = \frac{\sum SI}{\sum ST}$$

Keterangan:

KI = Kepemilikan institusional

SI = Saham yang dimiliki oleh institusi

ST = Jumlah saham yang diterbitkan

## Populasi, Sampel, dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil dari populasi berdasarkan pendekatan *non-probability* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016, 85). Anggota populasi akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi.

Adapun kriteria-kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun pengamatan 2014-2018 dan tidak mengalami *delisting*.
- 2) Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba pada tahun pengamatan 2014-2018.
- 3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah pada tahun pengamatan 2014-2018.
- 4) Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional pada tahun pengamatan 2014-2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode observasi non partisipan, yaitu metode pengumpulan data dengan observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya bertindak sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2016,145). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Selain itu, penelitian ini juga memperoleh sumber informasi dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal-jurnal akuntansi dan bisnis, serta mengakses situs-situs internet yang relevan.

## Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia dengan mengunduh data tersebut melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model regresi yang baik haruslah memenuhi uji asumsi klasik. Oleh karena itu, teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan uji asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi linier dan MRA.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk lebih meyakinkan atas kelayakan model yang dibuat, terutama untuk tujuan memprediksi (Utama, 2014:99). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal (Utama, 2014:99). Untuk menguji normalitas pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat alpha,  $\alpha = 0,05$ .

#### 2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2016,107). Untuk menguji autokorelasi pada penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Jika nilai DW-test sudah ada, maka nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% (Utama, 2014:104).

(1) Bila  $du < d < 4-du$ , berarti tidak ada autokorelasi.

(2) Bila  $dl > d > 4-dl$ , berarti ada autokorelasi.

(3) Bila  $dl \leq d \leq du$  atau  $4-du \leq d \leq 4-dl$ , berarti tidak dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya autokorelasi.

#### 3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016,103). Untuk menguji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas (Utama, 2014:106).

#### 4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai *variance* dari residual homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016,134). Untuk menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan uji Glejser. Model regresi dikatakan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Utama, 2014, 107).

### **Analisis Regresi Linier**

Analisis regresi linier dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Persamaan analisis regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Kompensasi Manajemen
- e = *error term*

### **Moderated Regression Analysis**

*Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan suatu model regresi dengan melakukan uji interaksi antara variabel. Model regresi ini merupakan aplikasi khusus regresi linear yang dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA merupakan salah satu cara untuk menguji apakah suatu variabel merupakan variabel moderasi atau tidak. Persamaan MRA dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien Regresi
- $X_1$  = Kompensasi Manajemen
- $X_2$  = Kepemilikan Institusional
- $X_1 X_2$  = Interaksi Kompensasi Manajemen dengan Kepemilikan Institusional
- e = *error term*

### **Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai koefisien determinasi kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu memberikan arti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016,95).

### **Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F ini menunjukkan signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun yang diestimasi, apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama pada variabel terikat. Variabel bebas dianggap mampu untuk menjelaskan variabel terikat dengan melihat nilai probabilitas *value* (Ghozali, 2016,96).

### Uji Hipotesis (Uji t)

Pada dasarnya pengujian hipotesis (uji t) menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan  $\alpha = 0,05$ .  $H_1$  diterima jika tingkat signifikansi  $t \leq \alpha = 0,05$  sedangkan  $H_1$  ditolak jika tingkat signifikansi  $t > \alpha = 0,05$  (Ghozali, 2016,107).

Untuk mengidentifikasi jenis variabel moderasi yang dipergunakan, perlu diketahui apakah variabel moderasi berhubungan atau tidak dengan variabel dependen dan apakah variabel moderasi berinteraksi dengan variabel independen (Ghozali, 2012, 224). Hal tersebut dilakukan agar dapat dengan mudah mengklasifikasikan variabel moderasi. Tabel 1 menyajikan jenis variabel moderasi sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Jenis Variabel Moderasi**

Ketentuan Hubungan atau Interaksi	Berhubungan dengan kriterion (dependen) dan atau predictor (independen)	Tidak berhubungan dengan kriterion (dependen) atau predictor (independen)
Tidak berinteraksi dengan predictor (independen)	1 Intervening, Exogen, Antesedent, Prediktor	2 Moderator (Homologizer)
Berinteraksi dengan predictor (independen)	3 Moderator (Quasi Moderator)	3 Moderator (Pure Moderator)

Sumber: Ghozali, 2012: 224

Berdasarkan tabel di atas, maka variabel moderasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Bila variabel moderator berhubungan dengan kriterion (dependen) dan atau predictor (independen), tetapi variabel moderator tidak berinteraksi dengan predictor (independen) maka variabel moderasi bukanlah moderator seperti tampak pada kuadran 1, melainkan tergolong ke dalam variabel intervening, exogen, anteseden atau predictor (independen).
- 2) Jenis variabel moderator pada kuadran 2 mempengaruhi kekuatan hubungan, tetapi tidak berinteraksi dengan variabel predictor (independen) dan tidak berhubungan secara signifikan baik dengan predictor (independen) maupun dengan variabel kriterion (dependen). Dalam keadaan seperti ini, nilai residual atau eror merupakan fungsi variabel moderator. Jenis moderator seperti ini disebut dengan variabel homologizer.
- 3) Pada kuadran 3, variabel moderator berhubungan dengan variabel criterion (dependen) dan/ atau variabel predictor (independen) serta berinteraksi dengan variabel predictor (independen), maka moderator ini tergolong dalam *quasi moderator* (moderator semu). Variabel moderasi ini dapat berfungsi sebagai variabel predictor (independen) dan sekaligus juga berinteraksi dengan independen lainnya.
- 4) Pada kuadran 4, variabel moderator tidak berhubungan dengan variabel criterion (dependen) dan predictor (independen), tetapi berinteraksi dengan variabel predictor (independen), maka moderator ini termasuk dalam kategori *pure moderator* (moderator asli). Variabel moderasi ini tidak berfungsi sebagai variabel predictor (independen) melainkan langsung berinteraksi dengan variabel predictor lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pada bagian ini memaparkan hasil penelitian serta pembahasan atas hasil penelitian tersebut. Pembahasan hasil penelitian diintegrasikan dengan teori atau temuan sebelumnya, sehingga dapat menjawab masalah yang diajukan.

### Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga menguji kemampuan kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Wilayah penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perusahaan publik atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 hingga 2018. Sampel penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dan diseleksi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 188 perusahaan dengan waktu pengamatan lima tahun. Adapun proses seleksi sampel disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Proses Penentuan Sampel Penelitian**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2014-2018.	136
2.	Perusahaan manufaktur yang memperoleh rugi fiskal dan komersial pada tahun pengamatan 2014-2018.	(64)
3.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing pada tahun pengamatan 2014-2018.	(15)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional selama tahun pengamatan 2014-2018.	(7)
5.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan pada tahun pengamatan 2014-2018.	(2)
	Total sampel per tahun	48
	Total sampel selama 5 tahun	240
	Data <i>Outlier</i>	(52)
	Total sampel penelitian	188

*Sumber.* Data diolah, 2020

### Hasil Statistik Deskriptif

Penghindaran pajak dianalisis berdasarkan data laporan keuangan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Prosedur untuk menghitung penghindaran pajak diukur dengan GAAP ETR yang membagi total beban pajak penghasilan yang terutang perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Kompensasi manajemen diukur dengan logaritma natural nilai total kompensasi manajemen yang diterima selama setahun yaitu penjumlahan kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi.

Deskripsi variabel penelitian memberikan informasi mengenai karakteristik variabel – variabel penelitian yang terdiri atas jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata, dan standar deviasi. Tabel 3 menyajikan hasil uji statistik deskriptif data yang menjadi variabel penelitian.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak	188	0,100	0,380	0,238	0,050
Kompensasi Manajemen	188	21,140	26,230	23,660	1,282
Kepemilikan Institusional	188	0,480	0,960	0,745	0,145

Sumber: Data diolah, 2020

Penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,100 dan nilai maksimum sebesar 0,380. Nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,238 mempunyai arti bahwa rata-rata persentase beban pajak penghasilan terutang dari laba sebelum pajak penghasilan komersial perusahaan sebesar 23,8 persen. Nilai standar deviasi penghindaran pajak sebesar 0,050 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai penghindaran pajak yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 5 persen.

Kompensasi manajemen memiliki nilai minimum sebesar 21,140 dan nilai maksimum sebesar 29,158. Nilai rata-rata kompensasi manajemen sebesar 26,230 mempunyai arti bahwa rata-rata logaritma natural dari total kompensasi yang diperoleh oleh manajemen kunci di dalam suatu perusahaan sebesar 23,660. Nilai standar deviasi kompensasi manajemen sebesar 1,282 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kompensasi manajemen yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,282.

Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,480 dan nilai maksimum sebesar 0,960. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,745 mempunyai arti bahwa rata-rata persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor badan luar negeri atau bank di dalam suatu perusahaan sebesar 74,5 persen. Nilai standar deviasi kepemilikan institusional sebesar 0,145 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepemilikan institusional yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 14,5 persen.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Jika tidak normal, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode kolmogorov-smirnov. Data tersebut dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* dari nilai *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas ditunjukkan dalam Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

Uji Regresi	<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>
Regresi Linear	0,233
Regresi Moderasi	0,132

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa berdasarkan *Sig. (2-tailed)*, dapat dilihat bahwa *Asymp.Sig.(2-tailed)* pada pengujian regresi linear (0,233) dan pengujian regresi moderasi (0,132) > dari *level of significant* (0,050), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penghindaran pajak, kompensasi manajemen, dan kepemilikan institusional berdistribusi normal.

### Uji Multikolenieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan pada regresi linear yang bertujuan untuk melihat nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor</i> (VIF)
Kompensasi manajemen	1,000	1,000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel di bawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinieritas antar variabel bebas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan alat analisis Durbin-Watson. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Uji Regresi	Durbin-Watson
Regresi Linear	1,262
Regresi Moderasi	1,346

Sumber: Data diolah, 2020

Dengan signifikansi 5 persen, untuk jumlah sampel (N) 188 dan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 3, nilai  $d_L = 1,729$  dan  $d_U = 1,794$ . Oleh karena, d statistik sebesar 1,262 dan 1,346 berada pada wilayah yang tidak mengandung autokorelasi atau model regresi yang telah dibuat tidak mengandung gejala autokorelasi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji ini dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji Regresi	Variabel	Sig.
Regresi Linear	Kompensasi Manajemen	0,997
Regresi Moderasi	Kompensasi Manajemen	0,974
	Kepemilikan Institusional	0,595

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 7 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

### **Pengujian Goodness of Fit**

Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian *goodness of fit* dengan signifikansi sebesar 5 persen.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Goodness of Fit**

Uji Regresi	Sig. F	Adjusted R Square
Regresi Linear	0,002	0,050
Regresi Moderasi	0,000	0,118

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F untuk uji regresi linear sebesar 0,002 lebih kecil dari  $\alpha = 0,050$  yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak (*fit*). Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen mampu memprediksi atau menjelaskan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018. Uji regresi linear dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,045 mempunyai arti bahwa 4,5 persen variasi dari penghindaran pajak dipengaruhi oleh variasi kompensasi manajemen, sedangkan 95,5 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

Nilai signifikansi F regresi moderasi (MRA) sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , yang berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak (*fit*). Besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,118. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kompensasi manajemen dan kepemilikan institusional sebesar 11,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 88,2 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak**

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian regresi linear dengan signifikansi sebesar 5 persen.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Regresi Linier**

Keterangan	Nilai Beta	Signifikansi
(Constant)	0,446	0,000
Kompensasi Manajemen	-0,009	0,002

Sumber: Data diolah, 2020

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Tabel 9 menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi manajemen pada penghindaran pajak adalah negatif sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti bahwa secara langsung kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis pertama diterima.

## ***Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak***

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Moderasi**

Model	Nilai Beta	Signifikansi	Keterangan
(Constant)	1,315	0,000	
Kompensasi Manajemen	-0,048	0,000	
Kepemilikan Institusional	-1,189	0,005	
Interaksi antara Kompensasi Manajemen dan Kepemilikan Institusional	0,053	0,003	Mampu Memperlemah

*Sumber:* Data diolah, 2020

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Dilihat dari nilai signifikansi interaksi kompensasi manajemen dan kepemilikan institusional sebesar 0,003 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Nilai beta interaksi kompensasi manajemen dan kepemilikan manajerial yang bernilai 0,053 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak, maka dari itu hipotesis kedua diterima.

Hubungan variabel kepemilikan institusional dengan variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,005, lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sedangkan interaksi variabel kepemilikan institusional dengan variabel independen dapat dilihat dari nilai signifikansi interaksi variabel kompensasi manajemen dengan variabel kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,003, lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan memperhatikan pengaruh langsung variabel moderasi dengan variabel dependen, dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi, maka variabel kepemilikan institusional digolongkan kedalam jenis moderasi semu atau *quasi moderator*. Quasi moderasi merupakan variabel moderasi yang berhubungan dengan variabel dependen dan atau independen serta berinteraksi dengan variabel independen (Ghozali, 2012: 224).

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kompensasi manajemen menyebabkan penghindaran pajak semakin menurun dan semakin rendah kompensasi manajemen menyebabkan penghindaran pajak semakin meningkat. Pemberian kompensasi yang optimal kepada manajemen dapat menurunkan masalah keagenan dalam perusahaan sehingga dapat dijadikan solusi untuk menurunkan perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Manajemen (*agent*) tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan

kinerja manajemen (Irawan dan Farahmita, 2012). Robinson *et al.* (2010) dan Armstrong *et al.* (2012) membuktikan terdapat pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, maka akan menimbulkan ketidakpastian yaitu apakah tindakan pajak tersebut berisiko atau tidak terhadap pelanggaran hukum bagi perusahaan (Murphy, 2004).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chalmers *et al.*, (2006), Armstrong *et al.* (2012), Irawan dan Farahmita (2012), Mayangsari, dkk. (2015) dan Zulma (2016) yang membuktikan terdapat pengaruh negatif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Gaji serta tunjangan adalah komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan laba perusahaan, dan menaikkan pajak (Puspita dan Harto, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, pemegang saham diharapkan dapat mempertimbangkan tingkat kompensasi yang diberikan kepada manajemen karena kompensasi yang optimal diharapkan dapat menurunkan kesenjangan informasi antara *principal* dan *agent*. Penurunan kesenjangan informasi tersebut dalam perusahaan dapat menjadi solusi untuk memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak.

### ***Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen pada Penghindaran Pajak***

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Kompensasi manajemen yang semakin tinggi menyebabkan penghindaran pajak yang semakin rendah, dan adanya kepemilikan institusional sebagai pemegang saham eksternal mampu mengurangi perilaku manajer yang oportunistik sehingga akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Berdasarkan peran investor institusional sebagai pihak eksternal yang mampu melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajer maka diprediksi bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka pemberian kompensasi yang besar untuk manajer tidak perlu dilakukan karena investor institusional sudah melakukan *monitoring* yang intensif terhadap manajer. Adanya peran investor institusional dalam memonitoring manajemen, maka sifat oportunistik manajer bisa diminimalisasi dan semakin menekan manajer untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Investor institusional memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer yang dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan. Investor institusional disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated investors*) yang mempunyai informasi yang lebih unggul dibandingkan investor non-institusional, mereka juga mempunyai kemampuan analisis yang lebih kuat terhadap fundamental suatu perusahaan maupun industri sehingga investor institusional lebih mampu untuk memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang dibandingkan investor lainnya. Selain faktor *sophisticated*, investor institusional pada umumnya menginvestasikan dana dalam jumlah yang besar, sehingga sudah seharusnya mereka melakukan *monitoring* yang lebih intensif terhadap kebijakan manajemen perusahaan (Warsini, 2016). Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan terhindar dari perilaku oportunistik (Ahmad dan Septriani, 2008). Pengaruh tidak langsung kepemilikan institusional diteliti oleh Desai dan Dharmapala (2006), di mana kepemilikan institusional digunakan sebagai ukuran kuat lemahnya mekanisme pengawasan dalam praktik *corporate governance*, dan membuktikan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar manajemen cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

## SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak serta untuk memperoleh bukti empiris kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bukti empiris mengenai teori akuntansi positif dalam menjelaskan pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pada perusahaan selaku wajib pajak untuk menentukan kebijakan dalam perusahaannya sesuai kaidah yang berlaku demi keberlangsungan serta reputasi perusahaan berkaitan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu untuk memotivasi pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih mampu mengatasi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hubungan antara kompensasi manajemen pada penghindaran pajak adalah negatif sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti bahwa secara langsung kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Dilihat dari nilai signifikansi interaksi kompensasi manajemen dan kepemilikan institusional sebesar 0,003 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Nilai beta interaksi kompensasi manajemen dan kepemilikan manajerial yang bernilai 0,053 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak, maka dari itu hipotesis kedua diterima.

Hubungan variabel kepemilikan institusional dengan variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,005, lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Sedangkan interaksi variabel kepemilikan institusional dengan variabel independen dapat dilihat dari nilai signifikansi interaksi variabel kompensasi manajemen dengan variabel kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,003, lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan memperhatikan pengaruh langsung variabel moderasi dengan variabel dependen, dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi, maka variabel kepemilikan institusional digolongkan kedalam jenis moderasi semu atau *quasi moderator*.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi kompensasi manajemen menyebabkan *tax avoidance* akan semakin menurun. Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Peran investor institusional sebagai pihak eksternal yang mampu melakukan pengawasan dengan baik terhadap manajer sehingga semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka pemberian kompensasi yang besar untuk manajer tidak perlu dilakukan karena investor institusional sudah melakukan *monitoring* yang intensif terhadap manajer.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Pemegang saham atau pemilik (*principal*) dapat mempertimbangkan besaran kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci, karena berdasarkan hasil penelitian ini kompensasi dapat digunakan untuk menjembatani konflik kepentingan yang muncul akibat hubungan agensi antara manajemen dengan pemegang saham. Selain itu, kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan kompensasi manajemen pada penghindaran pajak. Pemegang saham atau pemilik dapat pula mempertimbangkan

kepemilikan oleh institusional karena investor institusional dapat memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer yang dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan terhindar dari perilaku oportunistik termasuk melakukan penghindaran pajak.

## REFERENSI

- Ahmad, Afridian W. dan Septriani, Yossi. 2008. "Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya". *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 3(2), hal.47-55.
- Amri, Muhtadin. 2017. "Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Riset*, 6(1), hal.1-13.
- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, dan David F. Larcker. 2012. "The Incentives for Tax Planning". *Journal of Accounting and Economics* 53, hal.391-411.
- Astika, Ida B.P.. 2009. "Hubungan Keagenan dan Hukum Besi dalam Manajemen Laba". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 4 No. 2 (2009), July 2009. ISSN 2303 – 1018
- Balakrishnan, Karthik, Jennifer Blouin, and Guay, Wayne. 2012. "Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency?" *Working Paper*, University of Pennsylvania.
- Chalmers, Keryn, Koh, Ping-Sheng, and Stapledon, Geofery P. 2006. "The Determinant of CEO Compensation: Rent Extraction or Labor Demand". *The British Accounting Review*, 38(2004), 259–275
- Croci, Ettore, Gonenc, Halit, and Ozkan, Neslihan. 2012. "CEO Compensation, Family Control, and Institutional Investors in Continental Europe". *Journal of Banking and Finance*, 36(12), 3318–3335
- Damayanti, Fitri dan Susanto, Tridahus. 2015. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), hal.187-206.
- Desai, Mihir A. and Dhammika Dharmapala. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives". *Journal of Financial Economics* 79, hal.145-179.
- Dewi, Gusti A P. dan Sari, Maria M. R. 2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), hal.50-67
- Dewi, Ni N.K. dan Jati, I Ketut. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6.2: 249-260. ISSN: 2302-8556.
- Dyreng, Scott D., Hanlon, Michelle and Maydew, Edward L.. 2008. "Long Run Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol.83 No.1 (Jan., 2008), pp.61-82.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanafi, Umi dan Harto, Puji. 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), hal.1-11
- Hanlon, Michelle and Heitzman, Shane. 2010. "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics* 50, 2(2), hal.127-178.
- Irawan, Hendra P. dan Farahmita, Aria. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23 September 2012.
- Jensen, Michael C., dan Meckling, William H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol.3 Issue 4, October 1976, pp.305-360
- Khurana, Inder K. dan William. J. Moser. 2009. "Institutional Ownership and Tax Aggressiveness". [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Maria M. R. 2013. "Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), hal.58-66
- Laurenzia, Claudia dan Sufiyati. 2015. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage Terhadap Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2014". *Jurnal Ekonomi*, 20(1), hal.72-88
- Lins, Karl V. 2003. "Equity Ownership dan Firm Value Emerging Markets". *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), hal.159-184
- Masri, Indah dan Martani, Dwi. 2013. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt". *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin* 20 -23 September 2012
- Mayangsari, Cindy, Zirman, dan Haryani, Eka. 2015. "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak". *JOM FEKON Universitas Riau*, 2(2), hal.1-15.
- Mills, Lillian, Erickson, Merle M. dan Maydew, Edward L. 1998. "Investment in Tax Planning". *The Journal of The American Taxation Association*, 20(1), hal.1-20.
- Merslythalia, Dy Retta dan Lasmana, Mienati S. 2016. "Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), hal.116-123.
- Minnick, Kristina dan Noga, Tracy. 2010. "Do Corporate Governance Characteristics Influences Effective Tax Rate?" *Journal of Corporate Finance* 16, hal.703-718.
- Morck, Randall dan Yeung, Bernard. 2003. "Agency Problems in Large Family Business Groups". *Entrepreneurship: Theory and Practice* 27. ISS. 4, hal.367-382.
- Murphy, Kristina. 2004. "Aggressive Tax Planning: Differentiating Those Playing The Game from Those Who Don't". *Journal of Economic Psychology* 25, hal.307-329.

- Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. 2014. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2012". *Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara*, 18(3), hal.408-421
- Oktagiani, Rizka, Nasir, H. Azwir dan Ilha, H. Elfi. 2015. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)". *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, hal 1 – 15.
- Ozkan, Neslihan. 2011. "CEO Compensation and Firm Performance: An Empirical Investigation of UK Panel Data". *European Financial Management*, Vol.17(2), 260–285
- Puspita, Silvia Ratih dan Harto, Puji. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), hal. 1-13.
- Putranti, Anissa S. dan Setiawanta, Yulita. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*, hal.1-14.
- Robinson, John. S., Stephanie A. Sikes, dan Connie D. Weaver. 2010. "The Impact of Evaluating The Tax Function As a Profit Center On Effective Tax Rates". *The Accounting Review* 85, hal.1035-1064.
- Ross, Stephen A. 1973. "The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem". *The American Economic Review*, 63(2), hal.134-139.
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory* (2nd Edition). Scarrborough Ontario: Prentice Hall Canada, Inc.
- Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W.. 1986. "Large Shareholders and Corporate Control". *Journal of Political*, 94(31), hal.461-488.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukartha, I Made. 2008. "Pengaruh Manajemen Laba dan Kepemilikan Manajerial pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), hal. 1-25.
- Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. 2015. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite audit, dan Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47–62.
- Warsini, Sabar. 2016. "Peran Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit dan Praktik CG Negara dalam Tax Avoidance". *Symposium Nasional Akuntansi XIX Bandar Lampung*, 20-23 September 2016.
- Xynas, Lidia. 2011. "Tax Planning, Avoidance, Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance". *Revenue Law Journal*, 20(1), hal.1-37
- Watts, Ross L. and Zimmerman, Jerold L. 1986. "Positive Accounting Theory". *Journal of Accountancy*.

Zemzem, Ahmed and Ftouhi, Khaoula. 2013. "The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness". *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), hal.140-147.

Zulma, Gandy W.M. 2016. "Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga". *Simposium Nasional Akuntansi XIX Bandar Lampung*, 20-23 September 2016.